

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam beberapa provinsi, kabupaten dan kota untuk mempermudah pelimpahan tugas dan wewenang. Konsep tersebut sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan di daerah.¹ Demi mewujudkan suatu kesejahteraan perlu adanya pembangunan di suatu daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan secara umum berarti perbaikan di semua sektor, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi yaitu pembangunan pasar. Pentingnya pembangunan pasar karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan pasar telah menjadi penopang utama perekonomian di suatu daerah.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah tersebut Pemerintah Kota Jambi berusaha untuk menggali dan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

² Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, Siswidiyanto, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*, jurnal Administrasi Publik (JAP), Volumen 3, Nomor 5, 2017 hlm 758. Di akses pada 12 Desember 2019 pukul 20.16 WIB

mengoptimalkan potensi pasar dalam meningkatkan derajat Kota Jambi di mata daerah-daerah lain, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Jambi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang berorientasi publik dalam bentuk pengembangan struktur dan infrastruktur serta sarana dan prasarana seperti pasar sebagai penunjang pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung kinerja ekonomi dan meningkatkan aktivitas ekonomi, pada tahun 2015 telah dilakukan program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan dan jasa, seperti perbaikan sarana dan prasaran pasar-pasar milik Pemerintah Kota Jambi, pembinaan dan penyediaan ruang representatif untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk memberdayakan pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Jambi mengesahkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Penataan yang dimaksud adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada. Dengan tujuan untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada serta dapat mendorong terciptanya partisipasi dan

kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.³

Pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar dalam rangka peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing dilakukan dalam bentuk peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar, penerapan manajemen pengelolaan yang profesional, penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan fasilitas proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dilaksanakan berdasarkan asas: adil dan sehat, keamanan berusaha, kemandirian, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, kemanusiaan, akuntabel dan transparan, serta berwawasan lingkungan. Pengelola pasar berperan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang dan menyediakan ruang usaha bagi para pedagang. Kegiatan pembinaan dan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang yang dijelaskan sebelumnya dilakukan melalui peningkatan pelayanan kepada para konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/ penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Ketentuan dalam Peraturan

³ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Daerah Nomor 15 tahun 2015 dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang, pengelola pasar harus memperhatikan penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang, zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan, pembagian wilayah tempat usaha ditunjukkan agar lokasi setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi dan pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan tersebut, maka Pada tahun 2016 pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan program Revitalisasi Pasar tradisional yang diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan dan jasa, seperti perbaikan dan penambahan unit fasilitas sarana dan prasarana pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi.⁴

Pemerintah Kota Jambi telah merevitalisasi beberapa pasar tradisional yang berada di daerah Kota Jambi salah satunya adalah Pasar Tradisional Perumahan Nasional (Perumnas) Aurduri. Pasar yang terletak di Jalan Perumahan Nasional Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ini sudah resmi beroperasi dan digunakan oleh pedagang sejak tanggal 21 April 2017. Tujuan revitalisasi pasar tradisional Perumnas Aurduri 1 oleh Pemerintah Kota Jambi yaitu agar pasar ini dapat menampung para pedagang, meningkatkan perekonomian, meningkatkan kenyamanan masyarakat berbelanja,

⁴ Wawancara dengan Budi Siswanto,Sp, tanggal 12 Januari 2020 di Kantor Dinas perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi.

serta keberadaan pasar ini mampu bersaing dengan pasar modern yang saat ini tumbuh pesat di Kota Jambi.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi pra penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi di peroleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Dana Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1

No	Tahun	Dana Revitalisasi		Keterangan
		Sumber	Jumlah (Rp)	
1.	2016-2017	APBD	4,5 Miliar	Pembangunan Tahap Pertama
2.	2018	DAK	2,9 Miliar	Pembangunan Tahap Kedua

Sumber: Data diolah dari DPP Kota Jambi

Dari tabel diatas dapat dilihat Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam merevitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 sudah dilaksanakan sejak tahun 2016-2017. Pembangunan tahap pertama dilakukan menggunakan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kemudian pembangunan Tahap kedua dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2018 menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bantuan dari Pemerintah Pusat.⁶

Pembangunan revitalisasi pasar ini dimulai pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2016 dengan disediakannya 126 lapak dan 24 kios. Namun dikarenakan banyak pedagang yang sebelumnya tidak mendapatkan tempat di lokasi bangunan pertama Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia maka dikembangkan kembali

⁵ Wawancara dengan Budi Siswanto,Sp, tanggal 12 Januari 2020 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag) Kota Jambi.

⁶ UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi Tahun 2016

dengan penambahan bangunan tahap kedua. Namun berbeda dengan bangunan sebelumnya, bangunan baru ini hanya berupa pelataran saja. Bangunan pasar aurduri baru sudah mulai ditempati para pedagang. Meskipun tidak memiliki meja, para pedagang terpaksa menyiapkan sendiri meja dan lapaknya. Lapak di buat dari papan dan kayu seukuran lapak jatah mereka. Selain tidak memiliki lapak, bagian luar bangunan pasar yang juga merupakan area parkir belum juga dibangun.⁷

Para pedagang yang menempati bangunan pasar tahap kedua ini mengeluhkan menurunnya jumlah pendapatan, pernyataan tersebut di utarakan oleh sumar salah seorang pedagang. Beliau mengatakan saat ini pembeli banyak parkir di lokasi pasar pembangunan tahap pertama yang berdampingan langsung dengan bangunan yang baru. Pembeli yang parkir di depan tentu malas untuk berjalan ke belakang dan hal itu membuat pendapatan pedagang yang berjualan di bangunan baru ini menjadi menurun. Para pedagang berharap lahan parkir segera di bangun.⁸

Gedung dan fasilitas pasar akan dilanjutkan oleh Pemerintah Kota menunggu APBD tahun 2019 akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutan terkait pembangunan pasar tahap kedua tersebut.⁹ Selain permasalahan lapak dan lahan parkir tersebut terdapat pula beberapa permasalahan lainnya seperti tempat pembuangan sampah sementara yang berada di bagian depan pasar yang dapat mengganggu kenyamanan pembeli karena pengelolaan sampah yang

⁷ *ht ps://jektv.co.id/pasar-rakyat-aurduri-jambi/*, di akses pada 9 Januari 2020, pukul 13.40 WIB.t

⁸ *https://jambione.com/mulai-tempati-pasar-aurduri-baru/*, di akses pada, 10 Januari, pukul 20.30 WIB.

⁹ Wawancara dengan Evi Yana, Pedagang sayuran di pasar Tradisional Modern Perumnas Aurduri 1 Kota Jambi, pada tanggal 12 desember 2019.

kurang baik. Kemudian disini peneliti ingin melihat Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern di Kota Jambi.

Berdasarkan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, Siswidiyanto mahasiswa program studi Adminsitarsi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Tahun 2016 dengan judul Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan Revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perspektif *good governance*. Pada proses revitalisasi pasar tumpang telah mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Dalam mendukung proses revitalisasi terdapat berbagai upaya, antara lain adalah aspek fisik yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar dan aspek nonfisik yang berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Humam Mujahidin mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan” penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah revitalisasi pasar tradisional Ir Soekarno telah berjalan dengan hak dan sesuai dengan

¹⁰ Alfianita, Andi, dan Siswidiyanto. *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tradisional Tumpang Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 3, hlm. 760. Di akses pada 20 Desember 2019 Pukul 12.45 WIB.

harapan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan juga masyarakat. Selain itu manfaat yang diperoleh dari dengan pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional Ir. Soekarno yaitu memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu bersaing dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan yang terakhir adalah untuk mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak merugi dan mematikan pasar tradisional. Dalam penelitian ini juga telah disimpulkan bahwa pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional Ir. Soekarno telah berpengaruh terhadap peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap pelayanan pasar tradisional.¹¹ Walaupun memiliki konteks yang sama yaitu sama-sama meneliti tentang kebijakan implementasi revitalisasi pasar akan tetapi lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas yakni pasar aurduri 1, dan peneliti juga ingin melihat apakah implementasi kebijakan revitalisasi tersebut sudah efektif dalam mewujudkan pasar tradisional modern di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dikarenakan masih adanya permasalahan yang mendasar di pasar perumnas Aurduri 1 setelah direvitalisasi yaitu fasilitas-fasilitas seperti lapak pedagang,tempat sampah hingga lahan parkir dan pos keamanan yang belum terselesaikan,serta masih terdapat beberapa pedagang buah dan pedagang kaki lima yang berjualan di lahan parkir dan bahu jalan sehingga mengganggu keindahan pasar. maka dari itu penulis mengambil judul penelitian

¹¹ Humam Mujahidin, *Analisis Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan*. Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro, Hlm.13. Di akses pada 12 Desember 20.45 WIB.

“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern Di Kota Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 Dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern Di Kota Jambi?
2. Apakah Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 Sudah Efektif Dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern Di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah diatas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Perumnas Aurduri 1 Dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern Di Kota Jambi.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Perumnas Aurduri 1 Sudah Efektif Dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern Di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :

Secara Teoritis, penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan, serta wawasan bagi pembaca dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 dalam rangka mewujudkan Pasar Tradisional Modern.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 dalam mewujudkan Pasar Tradisional Modern.

1.5 Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan salah satu pokok bahasan yang paling banyak dibicarakan, baik dikalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Laswell dan Kaplan, dikutip dalam buku Taufiqurrokhman mengartikan kebijakan publik sebagai *projected of goal, valuz, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Wildavsky juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.¹²

Dari definisi mengenai kebijakan publik yang dikemukakan sebelumnya maka dapat di katakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan

¹² Taufiqurrokhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pers,2014),hlm.3.

yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Kebijakan publik dituangkan dalam Peraturan Perundangan yang bersifat memaksa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.¹³ Disini penulis menggunakan konsep kebijakan publik untuk menganalisis sejauhmana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 untuk mewujudkan pasar tradisional Modern di Kota Jambi.

Studi Kebijakan Publik menerapkan beberapa proses, diantaranya adalah Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.¹⁴

Edwards III menyatakan implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya pengelolaan input untuk menghasilkan output atau costumes bagi

¹³ *Ibid.* Hlm.3.

¹⁴ Aneta, Asna. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1. No.1, 2010. Hlm 55. Di akses pada 30 Desember 2019 pukul 08.00 WIB.

masyarakat.¹⁵ Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik.

Van Meter dan Van Horn di kutip dalam buku Winarno menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, *output* maupun sebagai hasil.¹⁶

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Enam variabel yang dimaksud yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan

¹⁵ Akib, Haedar. *Implementasi Kebijakan*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1. No.1, 2010. Hlm 1. Di akses pada 1 Januari 2020 pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Dewi Kartika Ratri, *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, 2014. Hlm.4 Di akses pada 11 Januari 2020 pukul 12.30 WIB

kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*Frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*).¹⁷

2. Sumber-sumber kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁸ Sumber daya yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar tradisional perumnas aurduri 1 ini adalah: staff yang memadai, informasi, anggaran ataupun pendanaan, wewenang dan fasilitas pendukung lainnya seperti gedung dan tanah.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dan mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut. Apa

¹⁷ Zulfian. *Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No. 2, 2014. Hlm. 36 Di akses pada 20 Januari 2020 pukul 12.45 WIB

¹⁸ *Ibid*, hlm. 37.

yang menjadi standar tujuan harus di pahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.¹⁹

4. Karakteristik Badan dan Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.²⁰

5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial dan Ekonomi

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil

¹⁹ *Ibid*, hlm.37.

²⁰ *Ibid*, hlm.37

kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapatkan perhatian yang kecil.²¹

6. Kecenderungan Pelaksana (*implementors*)

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen daei model yang telah dijelaskan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasikan tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting.²²

2. Pengertian Efektivitas

Menurut Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.²³

²¹ *Ibid*, hlm.38

²² *Ibid*, hlm.38

²³ Asnawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Kota Malang*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6. Di akses pada 11 Januari 2020 pukul 23.40 WIB.

Dari definisi mengenai efektivitas yang dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan kesesuaian, keberhasilan, seberapa jauh target yang telah di raih dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Disini penulis menggunakan konsep efektivitas untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian serta keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional perumnas aurduri 1 dalam mewujudkan pasar tradisional di Kota Jambi.

Menurut Campbell J.P pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁴

3. Revitalisasi

Menurut Danisworo Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami degradasi.²⁵ Revitalisasi juga bisa diartikan sebagai proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas.

²⁴ Lestana, Yudhi. Dan Pribadi, Ulung. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.3, 2016. Hlm.373. Di akses pada 11 Januari pukul 01.30 WIB.

²⁵ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta:Gramedia Pustaka,2011), Hlm,2.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, ekonomi atas sarana perdagangan. Upaya revitalisasi pasar tradisional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, pembenahan itu menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Program revitalisasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Disebutkan dalam pasal 13 ayat (1),(2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna peningkatan daya saing dalam bentuk pembangunan/revitalisasi pasar tradisional. Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional, fasilitas penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing, dan fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar tradisional.

Maksud dan tujuan revitalisasi pasar tradisional adalah:

1. Mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang di pasar tradisional.
2. Rehabilitasi Ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan fisik, harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial.

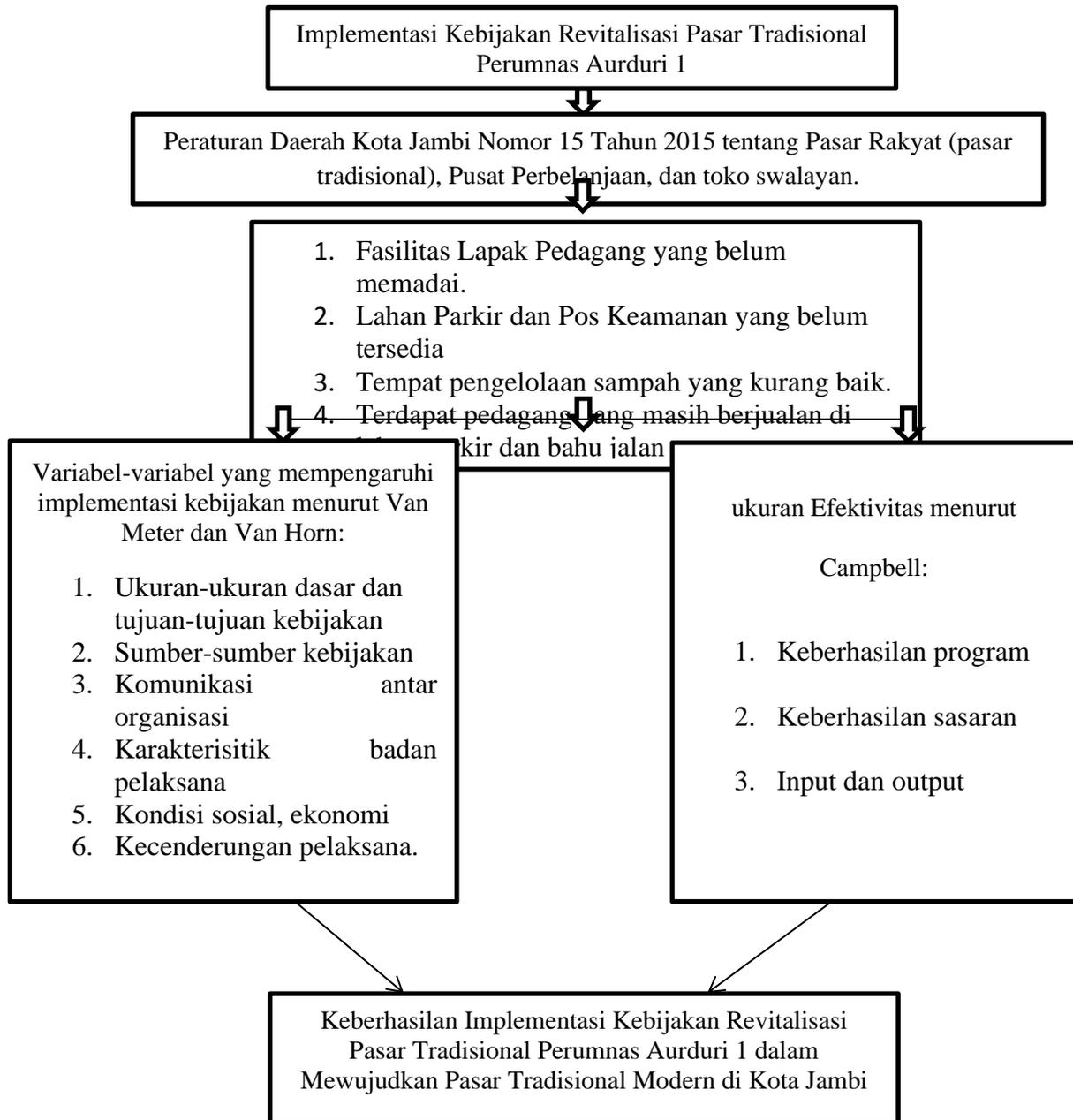
3. Revitalisasi sosial/institusional

Kegiatan harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan yang perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

Revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta mewujudkan pasar tradisional modern di Kota Jambi. Adanya revitalisasi pasar tradisional ini bukan hanya perbaikan fisik atau bangunan pasar saja tetapi harus dilakukan juga peningkatan sumber daya manusianya baik dari pedagang maupun pihak pengelola pasar.

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti (2020)

Berdasarkan Kerangka pikir diatas dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern di Kota Jambi” sehingga peneliti mendeskripsikan Implementasi Program tersebut dengan apa yang terjadi di lapangan dengan konsep yang telah dirancang oleh pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh banyak data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Ternyata terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain fasilitas lapak pedagang yang belum memadai, lahan parkir dan pos keamanan yang belum tersedia, dan tempat pengelolaan sampah yang kurang baik serta masih terdapat beberapa pedagang yang berjualan di lahan parkir dan bahu jalan sehingga dapat mengganggu keindahan pasar tradisional perumnas aurduri 1.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program/kebijakan sehingga peneliti ini menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn. Menurut pendapatnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ukuran-ukuran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pendekatan deskriptif peneliti menggambarkan suatu kondisi apa adanya yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis skripsi yang penulis telaah atau teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁶

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu berdasarkan masalah yang telah ditemui dalam pra observasi dan wawancara, peneliti melihat bahwa dengan metode kualitatif data yang akan didapatkan mengenai permasalahan akan lebih relevan dan bermakna, sehingga hasil penelitian akan jauh lebih mendalam dan valid. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti disini bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara ilmiah bagaimana keberhasilan dalam pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 melalui pengungkapan fenomena dari hasil

²⁶ John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), Hlm. 4-5.

wawancara serta fenomena yang ada di lapangan yang bisa di deskripsikan secara naratif.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dan di Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 Kota Jambi. Alasannya peneliti meneliti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional, dan pasar Perumnas Aurduri 1 adalah salah satu pasar yang direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif, Spradley dan Sugiyono menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.²⁷

Fokus dalam penelitian ini yaitu peneliti berfokus pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 di Kota Jambi. Karena keterbatasan data yang akan diperoleh, peneliti akan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.209.

memfokuskan data pada tahun 2018, serta melihat efektivitas dari kebijakan revitalisasi di pasar tradisional perumnas aurduri tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Data yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu berdasarkan observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁹ Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, hanya sebagai bahan penunjang dari data primer, sumber data ini bisa diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen pelaksanaan implementasi kebijakan revitalisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

²⁸ *Ibid*, hlm.225.

²⁹ *Ibid*, hlm.225.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Oleh karena penelitian kualitatif tidak mengenal sampel (cuplikan), maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini, baru kemudian peneliti menentukan berapa jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatan dengan objek penelitian.³⁰

Teknik penentuan informan ini adalah jenis data primer. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian. Teknik sampling yang digunakan ialah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau sudah ditentukan. Berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Tidak menutup kemungkinan jika peneliti menggunakan teknik *snowball* yaitu bertambahnya informan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan penelitian di lapangan.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁰ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, 2017, Hlm.16.

1. Kepala subbag Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
2. Seksi Pendapatan dan Pengelolaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
4. Pegawai/staff Seksi Evaluasi dan Laporan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
5. Pegawai/staff Kordinasi Lapangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
6. Masyarakat sekitar yang terdiri dari pedagang dan pembeli

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan bahan pembahasan dan analisis, didalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:³¹

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang akan diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek

³¹ *Ibid*, hlm 80-90

yang diteliti mengenai Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Perumnas Aurduri 1 dalam Mewujudkan Pasar Tradisional Modern di Kota Jambi yang telah dirancang sebelumnya.³²

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian ini. Hal yang akan diteliti dengan metode ini adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan keadaan fisik kota pada saat penelitian. Metode ini dipergunakan karena masyarakat Indonesia masih sulit dipahami hanya dengan satu kali kunjungan saja sehingga dibutuhkannya metode ini untuk memahami masalah dan dapat memperoleh data yang benar-benar valid dan realibel.³³

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk menilai dan memahami kondisi di lapangan bahwa pelaksanaan revitalisasi ini apakah sudah sesuai dengan mekanisme serta apakah sudah memberikan output yang sesuai atau tidak. Observasi dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum menulis proposal penelitian dan setelah dibuatnya proposal penelitian. Pada tahap sebelum penulisan proposal, peneliti melakukan penjelajahan umum. Tahap kedua yaitu dengan cara melakukan pencarian data melalui Dinas Terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta informan. Selanjutnya peneliti akan membandingkan data yang telah terkumpul dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahkan dokumen

³² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.372.

³³ Amirudin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016). hlm.213

terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flashdisk data tersimpan di website dan lain-lain.³⁴ Adapun data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seperti foto, laporan kegiatan, dokumentasi pemerintah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang telah dilakukan di pasar perumnas aurduri 1.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka atau dokumenter ini dilakukan di perpustakaan, dengan cara membaca buku-buku rujukan atau referensi, perundang-undangan, dokumen-dokumen pemerintah serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁵

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, memilih yang penting dan essensial sesuai

³⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Pers,2014),Hlm.33.

³⁵ Amirudin, *op.cit*, hlm.213.

dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.³⁶

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:³⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini data-data hasil wawancara yang didapat mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional tersebut. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *display data* atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi . Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

³⁶ V. Wiratna Sujarweni. *Op. Cit.* hlm.149.

³⁷ *Ibid*, hlm.244.

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada temuan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Penelitian kualitatif memiliki kelemahan karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol serta sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realistis secara lebih valid.³⁸ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini menggunakan Triangulasi Data, triangulasi ini menggunakan beraga,

³⁸ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., *Op.Cit*, Hlm. 18

sumber data dalam suatu penelitian. Kedua, peneliti menggunakan Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian. Selain itu yang menjadi indikator pendukung keabsahan data atau triangulasi peneliti disini yaitu peneliti itu sendiri yang merupakan instrumen utama dan juga bersifat *independent*, teori yang sifatnya tidak memihak.